

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tulisan ini akan membahas mengenai Peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan dalam pelebagaan Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Jepara tahun 2017-2020, Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) merupakan sayap dari Partai Persatuan Pembangunan lahir tanggal 12 Agustus 1988 atau 28 Dzulhijrah Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan berupaya untuk pembudayaan perempuan dari Pendidikan, agama, sosial, ekonomi dan budaya.

Hubungan perempuan dengan politik di Indonesia sudah baik, melalui demokrasi yang mengikut sertakan kaum perempuan dengan ikut sertakan perempuan di politik Indonesia membuat demokrasi berjalan dengan baik dengan begitu aktif perempuan di dunia politik membuat perempuan menjadi di hargai dan menjadikan posisi perempuan dan laki-laki menjadi seimbang di politik Indonesia dengan begitu semua masalah tentang perempuan di politik sudah selesai dan adanya wakil dari perempuan di politik untuk menjunjung kaum perempuan.¹

Demokrasi paska orde baru menjadikan perubahan-perubahan demokrasi dalam keseimbangan partisipasi laki-laki dan perempuan di politik dalam partisipasi politik perempuan maupun laki-laki di berbagai tingkatan di jelaskan dalam Undang-Undang No 12 tahun 2003 pasal 6 yang berbunyi 30% kuota di berikan setiap partai politik untuk perempuan peran perempuan dalam politik yang harus di lakukan dalam demokrasi di Indonesia yang akan menciptakan peran-peran yang besar di demokrasi dan perempuan di Indonesia karena pemikir dan pengalaman laki-laki dan perempuan selalu berbeda dan memiliki ketekunan dalam mengajak Amal Makruf Nahi Mungkar yang di harapkan akan muncul kebijakan yang bisa mewakili dan memberi penghargaan dari hak-hak perempuan dalam partisipasi perempuan di politik peraturan

¹ Erida Hasnah, Wirdah, R. Rida Indaryanti, Peran perempuan dalam legislatif sejak berdirinya Kabupaten Indragiri Hilir, jurnal BAPPEDA, VOL 2 AGUSTUS 2016

kuota 30% bagi perempuan berupaya menghidupkan peran perempuan dalam politik dan menjadi penghargaan khusus bagi kaum perempuan dalam partisipasi dalam politik walaupun begitu fakta di lapangan justru tidak sama dengan teori banyak halangan perempuan dalam politik baik dari diri sendiri maupun dari partai politiknya.²

Pelebagaan partai politik yaitu kegiatan kesetabilan dari tindakan maupun tingkah laku yang menjadikan partai politik tidak hanya menjadi organisasi tapi juga terdapat dimensi-dimensi dalam partai politik yaitu dimensi internal, dimensi eksternal, dimensi struktural-attitudinal dimensi eksternal, dimensi struktural yang saling persilangan sehingga menghasilkan drajat kesisteman hasil persilangan dari internal dan struktural, derajat identitas nilai hasil persilangan antara internal dan kultural, derajat otonomi partai hasil persilangan dari eksternal dan struktural dalam pengambilan keputusan serta derajat pengetahuan publik hasil persilangan dari eksternal dan kultural.

Gabungan dari dimensi tersebut mendapatkan faktor dalam penganalisis kegiatan pelebagaan pertama: drajat kesisteman, derajat identitas nilai, derajat otonomi partai dalam pengambilan keputusan serta derajat pengetahuan publik.

Menurut Randal dan svasand pelebagaan partai politik merupakan kegiatan yang menjadikan partai politik dari kegiatan yang kokoh penyajian kegiatan kesetabilan dari tindakan maupun tingkah laku yang menjadikan partai politik tidak hanya menjadi organisasi tapi juga terdapat dimensi-dimensi dalam partai politik yaitu dimensi internal, dimensi eksternal, dimensi struktural yang saling persilangan sehingga menghasilkan drajat kesisteman hasil persilangan dari internal dan struktural, derajat identitas nilai hasil persilangan antara internal dan kultural, derajat otonomi partai hasil persilangan dari eksternal dan struktural dalam pengambilan keputusan serta derajat pengetahuan publik hasil persilangan dari eksternal dan kultural.

²Very Wahyudi, Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender, Jurnal Politik Islam, Vol. 1 No. 1 (Jan-Jun) 2018, hlm 64 -65

Menurut Randal dan Svasand pelembagaan partai politik

Tabel 1.1

	Internal	Eksternal
Struktural	Kesisteman.	Derajad otonomi pengambilan keputusan.
Kultural	Derajad identitas nilai.	Derajad pengetahuan publik.

Menurut Basedau dan stroh membagi 4 aspek pelembagaan partai politik yaitu

Tabel 1.2

Dimensi Pelembagaan	Indikator
Pengakaran di masyarakat: partai politik harus di kenal di masyarakat sehingga membentuk akar di masyarakat.	Lamanya umur partai terhadap kemerdekaan. Lamanya umur partai permulaan. Perbedaan dukungan elektoral Saat pemilu terakhir. Terdapat intraksi fisik dengan masyarakat kecil.
Otonomi: walaupun partai berakar dari masyarakat, partai selalu berdiri sendiri tidak bergantung oleh kelompok luar dan dari individu lain partai.	Nilai dari jumlah partai dalam pergantian pemimpin. Perubahan dukungan elektoral pada saat di gantinya pemimpin partai politik. Terdapat otonomi dari keputusan individu dan partai. Penghargaan masyarakat terhadap partai.
Organisasi: anggota organisasi bertindak dengan serius di tingkat administrasi dan tindakannya semata-mata untuk kepentingan partai.	Power anggota partai. Adanya sumberdaya materi dan manusia. Kedatangan organisasi dari berbagai negara menimbulkan banyak kegiatan dalam organisasi tidak hanya kegiatan pemilihan dengan kampanye.
Koherensi: tingkahlaku partai merupakan kesatuan partai, terdapat tindakan-tindakan tertentu dalam permasalahan anggota partai.	Koherensi dari anggota parlemen (tidak keluar dari partai). Hubungan baik dalam pengelompokan di partai (semua memiliki fungsi masing-masing) Penghormatan semua anggota internal partai.

Dari pengertian Randall dan Svasand di atas kemudian di artikan lagi oleh Basedau dan Stroh dengan 4 aspek

pelembagaan partai politik adalah pertama Pengakaran di masyarakat partai politik harus di kenal di masyarakat sehingga membentuk akar di masyarakat. Kedua Otonomi walaupun partai berakar dari masyarakat, partai selalu berdiri sendiri tidak bergantung oleh kelompok luar dan dari individu lain partai. Ketiga Organisasi anggota organisasi bertindak dengan serius di tingkat administrasi dan tindakannya semata-mata untuk kepentingan partai. Keempat Koherensi tingkahlaku partai merupakan kesatuan partai terdapat tindakan-tindakan tertentu dalam permasalahan anggota partai.³

Partai Persatuan Pembangunan lahir sekitar 40 tahun yang lalu, Partai Persatuan Pembangunan yaitu merupakan salah satu partai besar karena rangkuman dari empat fusi partai politik pertama Partai Nahdlatul Ulama kedua Partai Muslimin Indonesia ke tiga Partai Syarikat Islam Indonesia ke empat Partai Islam Perti.

Saat itu terdapat sekitar 16 organisasi politik yang menyatu dengan Partai persatuan Pembangunan dari 16 organisasi tersebut yaitu Muhamamadiyah, Jami'atul Washliyah, Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia, Persatuan Islam, Nahdlatul Wathan, Mathla'ul Anwar, Serikat Nelayan Islam Indonesia, Kongres Buruh Islam Merdeka, Persatuan Umat Islam, Al-Ittihadiyah, Persatuan Organisasi Buruh Islam se Indonesia, Persatuan Guru Agama Islam Republik Indonesia, Himpunan Seni Budaya Islam, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, Al-Irsyad Al-Islamiyah, serta Wanita Islam. Dari banyaknya organisasi-organisasi yang bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan membuat Partai Persatuan Pembangunan di kenal oleh semua kalangan dan terkenal dengan sebutan rumah besar umat islam.

Partai Persatuan Pembangunan saat ini kehilangan power, pada pemilu yang pertama tahun 1977 Partai Persatuan Pembangunan memperoleh suara 18.745.565 dan 29,29% sehingga mendapat 99 kursi di DPR 27,12% dari total 360

³Sigit pamungkas, *partai politik teori dan praktik di Indonesia*, (Institute for Democracy and welfarism Perum Griya Saka Permai Jl. Arjuna A-21 Plumbon, Sardonoharjo, Ngaglik, Seleman, Yokyakarta 2011) hal 70-76.

kursipada Pemilu 2009Partai Persatuan Pembangunan hanya mendapat 5,5 juta suara 5,32% dengan 38 kursi di DPR.

Partai politik satu demi satu meninggalkan Partai Persatuan Pembangunan dan mendirikan partai sendiri, demikian juga dengan organisasi-organisasi yang dulu bergabung, kini meninggalkan Partai Persatuan Pembangunan.

Masalah mengenai perempuan di politik secara umum sudah muncul sejak lama didunia politik Indonesia bahkan politik di dunia, sejak tahun 2002 sudah adanya pengenalan pada masyarakat terhadap politik perempuan dalam keterlibatan perempuan di dunia politik sesungguhnya masalah mengenai perempuan dalam dunia politik umum adalah masalah yang menuntut untuk adanya kesetaraan hak antara kaum perempuan dan kaum laki-laki masalah perempuan menjadi aspek utama dalam relasi kelas, golongan usia maupun identitas dan pada pemilu tahun 2004 keterwakilan perempuan naik 30% dalam politik di Indonesia maupun di negara-negara lain.

Selain itu masalah perempuan di politik Indonesia yaitu:

- a. Masalah sistem politik: dalam peran perempuan masih lemah kendala ini seakan-akan laki-laki mendominasi jalannya politik di Indonesia sehingga membuat kurangnya peran politik perempuan di Indonesia.
- b. Masalah budaya patriarki: masalah ini masih menganggap bahwa budaya dari pihak laki-laki masih memegang kekuasaan politik.
- c. Masalah psikologi: ini lebih mengarah pada psikolog dari pihak perempuan ketakutan perempuan dalam memperoleh kuasa dalam politik.⁴

Dari banyaknya masalah di atas tentang perempuan mengundang simpati dari kalangan-kalangan dalam menjujung nasib perempuan dengan melakukan, gerakan dan peran dari perempuan di harapkan bisa menjujung peran-peran perempuan dalam politik.

Selain itu dari hak-hak yang di tuntut perempuan untuk kesetaraan dari kaum laki-laki menurut instruksi Presiden Nomer 9 Tahun 2000 berbunyi kesetaraan gender yaitu: adanya

⁴ St Habibah, Partisipasi dan Peran Perempuan dalam Partai Politik, Jurnal Al-Maiyyah, Volum, 8 No 2 Juli-Desember 2015 Hal 343-345.

kesetaraan kaum perempuan dan kaum laki-laki dalam mencapai hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan.

Peran perempuan dalam partai politik menurut Gross, Masin dan Mc Echem adalah pengharap seseorang dalam menduduki jabatan sedangkan menurut Ohen peran adalah kedudukan dalam jabatan yang di harapkan setiap orang sedangkan menurut Dahrendarf peran adalah setiap orang memiliki pengaruh yang berbeda-beda sehingga perlu pemahaman sosiologis setiap orang sesuai dengan jabatan.

Menurut jabaran para ahli di atas peneliti dapat menyimpulkan peran merupakan sesuatu yang melekat pada seseorang/kelompok ketika mendapat kedudukan dalam masyarakat baik sosial, ekonomi maupun budaya, peran di golongkan menjadi 3 (tiga) golongan 1). peran mencangkup peraturan-peraturan seseorang di sosial masyarakat 2). peran mencangkup kegiatan di masyarakat tentang peran yang harus di lakukan 3). peran mencangkup pengaruh seseorang dalam masyarakat untuk memakmurkan anggota masyarakat.

Peran dari perempuan di dalam politik di Indonesia sudah menjalani banyak halangan dan tantangan dalam politik gerakan-gerakan dari perempuan ada ketika banyak pihak yang mengusulkannya berawal dari tidak nyaman dari pihak perempuan dan adanya gerakan dari pihak perempuan gerakan yang terus menyesuaikan dari masa ke masa.

Masa penjajahan perempuan sudah berupaya memperjuangkan peran-perannya di kerajaan di zaman dulu terdapat pemimpin perempuan di Cina yaitu: Ratu sima yang berasal dari kerajaan Holing yaitu yang bertempat di kerajaan kalinga di jawa tengah kepemimpinan yang bagus dan bijaksana selain itu terdapat juga ratu dari majapait yaitu: ratu tribuanatungga dewi jaya wisnu wardinasi berusia 22 tahun. Di zaman dulu peran perempuan di Indonesia berupaya memukul mundur konialisme dari Indonesia perempuan-perempuan Indonesia selalu mengibarkan bendera perang terhadap penindasan kolonialisme dalam mengusir penjajah sewenang-wenangnya di bumi pertiwi.

Tokoh pahlawan wanita pada masa penjajahan yaitu Cut Nyak Dien berasal dari Aceh yang sangat berpengaruh dalam pengusiran penjajah belanda dari indonesia dan Martha chrsitina

dan lain-lain pejuang perempuan yang tidak patah semangat dalam ikut memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajah.

Saat kepemimpinan Hindia Belanda sekitar abad 20 melakukan Pendidikan barat kepada masyarakat Indonesia dari Pendidikan barat tersebut di manfaatkan baik oleh masyarakat Indonesia dalam upaya pembebasan dari penjajahan terdapat tokoh perempuan di masa abad 20 yaitu R.A Kartini, Dewi Sartika, walanda Maramis berupaya membangun organisasi-organisasi untuk memerdekakan Indonesia.

Wanita Persatuan Pembangunan di Jepara mempunyai tujuan menyolidkan dari keluarga-keluarga agar tetap memilih Partai Persatuan Pembangunan di banding partai politik yang lain Partai Persatuan Pembangunan mempunyai moto keluarga Bersatu, salah satu alasan kemerosotan dari Partai Persatuan Pembangunan yaitu karena kader-kader muda beralih partai politik lain karena itu Wanita Persatuan Pembangunan melakukan penyolidkan dari pihak keluarga khususnya dari pihak ibu.

Peran dari Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara dalam pelebagaan partai Persatuan Pembangunan, peranannya begitu besar terdapat ajakan Amal Makruf Nahi Mungkar yaitu kegiatan rutin pengajian selapanan di setiap PAC Kecamatan, kegiatan sosial kemasyarakatan seperti bantuan banjir tanah longsor di Desa Tempur Kabupaten Jepara tahun 2021 seperti baksos yang terdapat di Desa Dorang Kabupaten Jepara Wanita Persatuan Pembangunan ikut berperan dalam turun langsung ke lapangan dalam bantuan sosial, donor darah, peran dari Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan berupaya untuk memperkenalkan Partai Persatuan Pembangunan di masyarakat umum peran tersebut telah di rancang atau sudah di rencanakan sebelumnya sehingga setiap Peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan berjalan dengan lancar walaupun begitu perempuan memiliki masalah peran dalam partai politik dari kewajiban perempuan dalam mengurus keluarga terkadang menjadi permasalahan yang serius ijin dari suami merupakan masalah serius perempuan dalam partai politik.

Selain itu terdapat pula masalah perempuan di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) khususnya di Kabupaten Jepara yang menonjol adalah masalah anggaran ekonomi dan izin dari

suami dari anggaran ekonomi baik dalam kegiatan politik maupun kegiatan sosial keagamaan karena perempuan di Partai Persatuan Pembangunan tidak hanya memperjuangkan politik tapi juga memperjuangkan nilai-nilai sosial keagamaan dalam bentuk baksos, pengajian di masyarakat dan lain-lain dalam mengembangkan partai dari perjuangan tersebut membutuhkan dana yang besar yang tidak mungkin di peroleh dari partai karena partai Persatuan Pembangunan saat kegiatan partai tujuannya hanya kemaslahatan umat Amal Makruf Nahi Munkar tidak adanya nilai ekonomi di dalam partai oleh karena itu setiap kegiatan perempuan di kegiatan sosial keislaman maupun politik menggunakan dana iyyuran masing-masing anggota perempuan dari gerakan perempuan (WPP) Wanita Persatuan Pembangunan.

Peneliti menulis tentang Peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan dalam Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan sangat menarik karena Partai Persatuan Pembangunan merupakan partai terbesar di Jepara perjuangan para perempuan di dalam mempersatukan dan membangun Partai Persatuan Pembangunan tidak hanya dalam sektor politik tapi juga dalam sosial keagamaan, perempuan selalu berkencibung di masyarakat dalam memperkenalkan partai dari peran-peran dari Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan.

Penelitian ini sangat penting karena penelitian ini membahas tentang Peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan dalam Pelembagaan di Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Jepara tahun 2017-2020 dengan rumusan masalah Bagaimana Peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan dalam Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Jepara tahun 2017-2020 ?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan masalah dengan pokok dari permasalahan adalah: Peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan dalam Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Jepara tahun 2017-2020 yaitu:

Bagaimana Peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan dalam Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Jepara tahun 2017-2020?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini untuk mengetahui Peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan dalam Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Jepara tahun 2017-2020 dengan melakukan penelitian atau pendekatan lapangan dan melalui jurnal-jurnal dalam menyelesaikan penelitian ini.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan dalam Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Jepara tahun 2017-2020.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya skripsi ini di harapkan pembaca bisa memperoleh manfaat dari membacanya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dengan adanya teori-teori di skripsi ini semoga bisa memberikan pengetahuan baru kepada pembaca dalam Peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan dalam Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan untuk memperkaya wawasan.
 - b. Menjadi dokumen dari fakultas dakwah dan komunikasi prodi pemikiran politik islam IAIN kudus.
2. Segi Praktis

Disamping dalam segi teori ada juga manfaat segi praktis yaitu:

 - a. ada manfaat dari pembaca dengan adanya penelitian ini dalam kegiatan kepolitikan.
 - b. Memberikan pengetahuan dari semua pihak.
 - c. Memberikan penggambaran kepada mahasiswa yang mau melakukan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan sistematika ini untuk bisa memahamkan pembaca dalam penggambaran antara satu dengan yang saling berhubungan yang sesuai dengan penelitian yang sistematis dan ilmiah.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I terdapat penjelasan latar belakang, rumusan masalah fokus, penelitian tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

Dalam teori ini terdapat teori yang sesuai judul penelitian yaitu: pengertian Peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan dalam Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Jepara tahun 2017-2020 untuk memperkaya wawasan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab tiga terdapat jenis dan pendekatan, setting penelitian, subjek Penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan pengujian keabsahan data Peran Pengurus Wanita Persatuan Pembangunan dalam Pelembagaan Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Jepara tahun 2017-2020.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dimana didalamnya berisi tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serupa dimasa yang akan datang serta kritik yang bersifat konstruktif dan kata penutup.